



# RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2026

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan-  
Benteng Ciamis 46217



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,Wr.Wb

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mengacu kepada RPD Kabupaten Ciamis tahun 2025-2026, dan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan dapat dilakukan perubahan.

  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS  
**Drs. DAUD M. MULYATNA. S.Sos., M.Si**  
Pemuda Utama Muda, IV/c  
NIP.19710301 199101 1 002

# DAFTAR ISI

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                      | i  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                  | 10 |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                 | 10 |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                 | 11 |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan.....                                                               | 14 |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                           | 15 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....                                         | 18 |
| 2.1 Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis .....        | 18 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.....                                  | 28 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia .....                                                          | 29 |
| 2.2.2 Asset/Modal .....                                                                  | 32 |
| 2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional.....                                             | 19 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis .....                           | 20 |
| 2.3.1 Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan .....                                         | 20 |
| 2.3.2 Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....                    | 28 |
| 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis..... | 31 |
| 2.5 Kelompok Sasaran Layanan.....                                                        | 33 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                            | 34 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....                                                           | 37 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                                  | 48 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDANAAN.....                          | 51 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....                                       | 56 |
| 7.1 Indikator Kinerja Utama .....                                                        | 62 |
| 7.2 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Tahun 2024-2026 .....                     | 65 |
| BAB VIII PENUTUP.....                                                                    | 66 |



## DAFTAR TABEL

## Halaman

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal.....                                                                              | 29 |
| Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....                                                                           | 29 |
| Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian.....                                                                             | 30 |
| Tabel 2. 4 Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2023 Periode Bulan Desember .....                                                                   | 30 |
| Tabel 2. 5 Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023....                                            | 30 |
| Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Perhubungan Tahun 2023 .....                                                      | 31 |
| Tabel 2. 7 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop.....                                                                     | 32 |
| Tabel 2. 8 Jumlah Perlengkapan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.....                                                             | 34 |
| Tabel 2. 9 Jumlah Peralatan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.....                                                                | 35 |
| Tabel 2. 10 Data Terminal Angkutan Jalan Di Kabupaten Ciamis .....                                                                             | 19 |
| Tabel 2. 11 Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas Yang Sudah Dipasang di Kabupaten Ciamis .....                                                       | 21 |
| Tabel 2. 12 Lokasi Kegiatan Pengadaan Traffic Light.....                                                                                       | 21 |
| Tabel 2. 13 Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara .....                                                                    | 22 |
| Tabel 2. 14 Perbandingan Jumlah Halte.....                                                                                                     | 23 |
| Tabel 2. 15 Lokasi Halte/Shelter .....                                                                                                         | 24 |
| Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....                                                                               | 26 |
| Tabel 2. 17 Jumlah Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....                                                                           | 28 |
| Tabel 2. 18 Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir .....                                                                              | 29 |
| Tabel 2. 19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan.....                                                                  | 30 |
| Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....                                                | 34 |
| Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra .....                                                                                                    | 38 |
| Tabel 4. 2 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan .....                                                                                           | 41 |
| Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan .....                                                                                            | 48 |
| Tabel 6. 1 Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.....                                                     | 52 |
| Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026..... | 61 |
| Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis .....              | 63 |
| Tabel 7. 3 Target Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2024-2026 ....                                          | 65 |

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| GAMBAR 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ..... | 19 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis 2025-2026 dan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis meliputi : (1) Persiapan penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Renstra, (3) Penyusunan rancangan akhir Renstra dan (4) penetapan Renstra. Penyusunan Perubahan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Sebagai dasar rancangan awal renstra telah disesuaikan dengan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya, sehingga sesuai dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun, Selain itu Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Sektor transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan Negara atau daerah, mengingat sangat pentingnya peran tersebut, transportasi sering disebut

sebagai urat nadi perekonomian nasional. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai factor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa. Transportasi yang diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Urgennya transportasi diibaratkan urat nadi dalam tubuh manusia, sehingga tidak boleh terputus. Dalam kegiatan sehari-hari, sangat sulit masyarakat dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya jika tidak tersedia transportasi dengan baik.

Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Daerah terpencil akan berkembang dengan baik dan pesat bila tersedia prasarana dan sarana transportasi yang cukup, sebaliknya daerah bisa menjadi terpencil karena tidak tersedia prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Bahkan daerah yang telah berkembang dan maju sekalipun dapat saja berubah menjadi daerah terisolir ketika tidak dapat dijangkau oleh sarana atau moda transportasi. Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini terkait dengan infrastuktur dan pemerataan wilayah. Akses transportasi yang mudah, aman dan lancar ke berbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu. Transportasi tidak dapat dilihat secara parsial/sektoral semata dalam penanganannya. Sebagaimana filosofinya transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2023-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menterti Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026;
38. Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/3314.A/Bapp/2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Perhubungan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang perhubungan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis disusun mengacu pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih berjalan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Menjelaskan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Isu Strategis

Mereview faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasilnya, sehingga diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berisi uraian rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis**

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok "membantu Bupati untuk melaksanakan proses urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya"

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai Tugas dan fungsi Sebagai Berikut :

1. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Kedudukan Tugas Dan Fungsi:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis;
2. Dinas Perhubungan di pimpin oleh Kepala Dinas;
3. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:
4. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
5. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
6. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya tugas pokok dan rincian tugas dari masing- masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 tahun 2016 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang perhubungan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
  - c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
  - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
  - i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  - j. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - k. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
  - l. pelaksanaan verifikasi keuangan;
  - m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - n. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  - o. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - r. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan terminal.

Bidang Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang angkutan;
- b. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum;
- c. perencanaan dan penyusunan jaringan trayek angkutan umum.
- d. penyelenggaraan izin angkutan umum;
- e. penyusunan dan evaluasi tarif angkutan umum dan terminal;
- f. penyusunan petunjuk teknis penetapan jenis kendaraan angkutan umum dan batasan maksimum berat kendaraan angkutan umum beserta muatannya pada ruas jalan kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan:

- 1) Seksi Bina Usaha Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Bina Usaha Angkutan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, penyiapan angkutan Umum.

Seksi Bina Usaha Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan izin usaha angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek angkutan umum;
- b. penyelenggaraan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan, angkutan kota, angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di daerah;
- c. penyusunan rencana penetapan tarif Angkutan Umum dan Jasa Terminal yang diusahakan oleh pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan izin insidentil dalam trayek;
- e. pelayanan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan lingkungan dan angkutan berbasis aplikasi yang beroperasi di daerah;
- f. fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili di daerah;
- g. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;

- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Jaringan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Jaringan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penyiapan jaringan trayek serta perhitungan kebutuhan dan jenis moda angkutan.

Seksi Jaringan Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan lokasi terminal penumpang Tipe C;
- b. fasilitasi pembangunan terminal Penumpang Tipe A, B dan C dan terminal angkutan barang;
- c. penyusunan jaringan trayek dan alokasi kebutuhan angkutan dalam daerah;
- d. fasilitasi dan pengoperasian pembangunan terminal angkutan barang;
- e. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis izin trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus asal dan/atau tujuan trayek wilayah dalam daerah;
- f. penyusunan dan perencanaan penetapan jaringan lintas angkutan jalan kabupaten (Barang dan Orang);
- g. penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten;
- h. penyusunan perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan fasilitasi perizinan angkutan sungai, danau, pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah kabupaten;
- i. perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan Umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- j. fasilitasi perizinan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- k. fasilitasi penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan kereta api khusus dalam daerah;
- l. Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan
- m. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;



- o. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas;
- b. penyusunan rencana penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan fasilitas lalu lintas dan pendukung jalan;
- d. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- e. pelaksanaan penetapan dan pengaturan sistem informasi lalu lintas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan penetapan kecepatan maksimum kendaraan;
- g. penyelenggaraan rekomendasi teknis analisa dampak lalu Lintas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahi:

- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas;
- b. penyusunan bahan penetapan lokasi dan penyediaan Perlengkapan lalu lintas;
- c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;

- d. penyelenggaraan rekomendasi teknis penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas;
- e. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di wilayah daerah;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi/izin penataan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum serta penyelenggaraan tempat parkir khusus bongkar muat;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis lalu lintas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan.

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan perizinan angkutan umum dan angkutan barang;
- c. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan lalu lintas;
- d. fasilitasi pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan bidang perhubungan
- e. pelaksanaan pengawasan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik sarana, Prasarana perhubungan, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta perbengkelan kendaraan bermotor.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan pengoperasian terminal, stasiun kereta api dan pengujian kendaraan bermotor.
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- d. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pendukung dan penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahi :

- 1) Seksi Teknik Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis sarana dan Prasarana perhubungan.

Seksi Teknik Sarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan teknis, pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana perhubungan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan terminal angkutan barang dan penumpang;
- c. penyusunan rencana prototipe dan jenis angkutan umum;
- d. penyusunan rencana rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. penyelenggaraan perizinan pembuatan tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau;
- f. penyelenggaraan perizinan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- g. penyusunan rekomendasi rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan fasilitasi

- perizinan pelabuhan sungai, Danau dan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan nasional;
- h. fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
  - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Teknik Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum, pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- Seksi Teknik Keselamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana di bidang teknik keselamatan;
  - b. penyusunan laporan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
  - c. penyusunan data daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
  - d. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan dalam Daerah ;
  - e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
  - f. Penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
  - g. pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis pada pengguna dan penyedia jasa angkutan;
  - h. pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi izin sekolah pengemudi;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
  - k. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

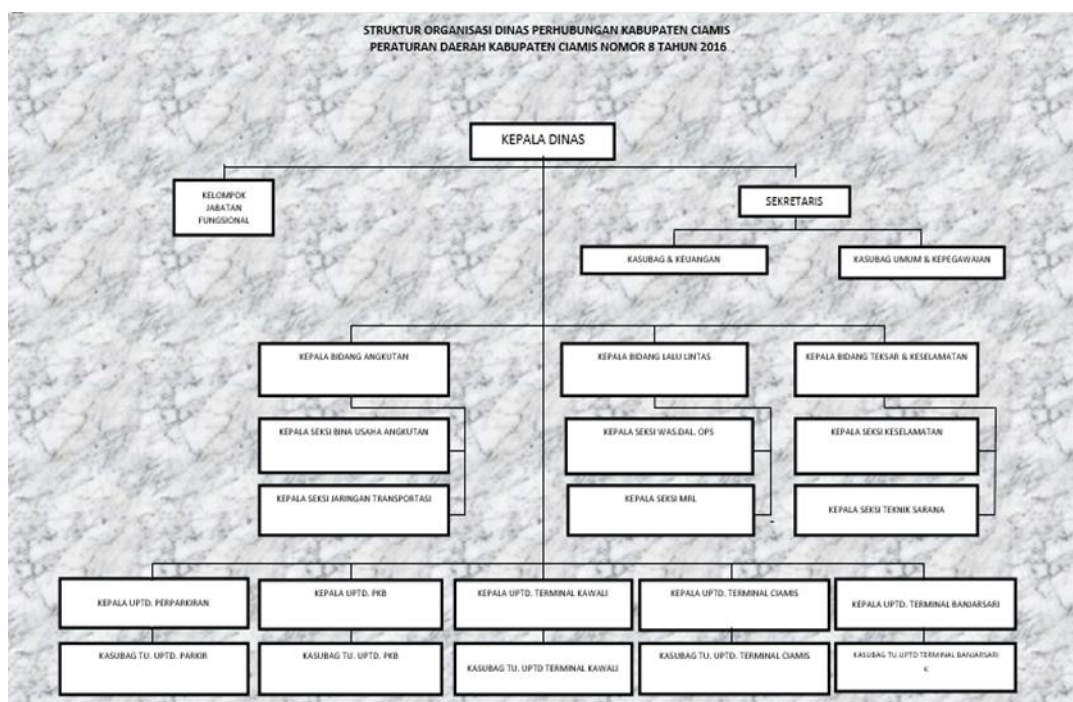
#### 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi dari uraian tugas masing-masing unit yang telah dijelaskan seperti diatas yaitu :



Gambar 2 1  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Ciamis

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip *the right man on the right job* sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan non formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus-kursus/ diklat teknis bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 73 PNS, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

#### a) Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan Formal

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal

| NO     | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH PEGAWAI (ORANG) |
|--------|--------------------|------------------------|
| 1      | S-3                | -                      |
| 2      | S-2                | 8                      |
| 3      | S-1/D.IV           | 15                     |
| 4      | DIII/Akademi       | 8                      |
| 5      | DII                | 4                      |
| 6      | DI                 | -                      |
| 7      | SMA Sederajat      | 34                     |
| 8      | SMP Sederajat      | 2                      |
| 9      | SD Sederajat       | 2                      |
| Jumlah |                    | 73                     |

#### b) Sumber Daya Manusia Menurut Pangkat Dan Golongan

Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| NO | PANGKAT DAN GOLONGAN | JUMLAH (Orang) |
|----|----------------------|----------------|
| 1  | Pembina/Gol.IV       | 5              |
| 2  | Penata/Gol.III       | 32             |

|               |                   |           |
|---------------|-------------------|-----------|
| 3             | Pengatur/ Gol. II | 34        |
| 4             | Juru/ Gol. I      | 2         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>73</b> |

c) Sumber Daya Manusia Menurut Status Kepegawaian

*Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian*

| NO     | STATUS KEPEGAWAIAN | JUMLAH PEGAWAI |
|--------|--------------------|----------------|
| 1      | PNS                | 73             |
| 2      | NON PNS            | 155            |
| Jumlah |                    | 228            |

d) Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Struktural

Untuk periode Bulan Desember Tahun 2023 jumlah jabatan struktural yang ada sebanyak 23 orang dan yang terisi 23 orang, yakni :

*Tabel 2. 4 Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2023 Periode Bulan Desember*

| NO             | JABATAN STRUKTURAL | ADA       | TERISI    | KETERANGAN           |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
| S <sub>1</sub> | ESELON II.B        | 1         | 1         | Kepala Dinas         |
| u <sub>2</sub> | ESELON III.A       | 1         | 1         | Sekretaris Dinas     |
| m <sub>3</sub> | ESELON III.B       | 3         | 3         | Kepala Bidang        |
| b <sub>4</sub> | ESELON IV.A        | 13        | 13        | Kasi/Kasubag/Ka.UPTD |
| 5              | ESELON IV.B        | 5         | 2         | Kasubag UPTD         |
| <b>JUMLAH</b>  |                    | <b>23</b> | <b>20</b> |                      |

e) Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Fungsional

Di Dinas Perhubungan juga terdapat jabatan fungsional yaitu penguji kendaraan bermotor dan ada 2 (dua) orang yang menjabat sebagai fungsional penguji kendaraan bermotor, dengan rincian :

*Tabel 2. 5 Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023*



| NO | JABATAN                                     | JUMLAH (ORANG) |
|----|---------------------------------------------|----------------|
| 1. | Penguji Tipe Kendaraan Bermotor Tingkat IV  | 2              |
| 2. | Penguji Tipe Kendaraan Bermotor Tingkat III | 5              |
|    | Penguji Tipe Kendaraan Bermotor Tingkat II  | 3              |
|    | Penguji Tipe Kendaraan Bermotor Tingkat I   | 1              |
|    | <b>Jumlah</b>                               | <b>11</b>      |

f) Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat

*Tabel 2. 6* Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Perhubungan Tahun 2023

| NO | DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN                                          | JUMLAH (ORANG) |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | PPNS                                                               | 2              |
| 2. | Penguji Kendaraan Bermotor                                         | 11             |
| 3. | Bimtek Penilai Andalalin                                           | 1              |
| 4. | Operasional Terminal                                               | 30             |
| 5. | Penyusunan Program<br>Penyuluhan Keselamatan<br>Transportasi Jalan | 30             |
|    | <b>Jumlah</b>                                                      | <b>74</b>      |

Dari kelima diklat teknis perhubungan tersebut diatas penyelenggaranya sebagian besar dari Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal. Selain diklat teknis perhubungan juga ada beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek atau workshop yang diselenggarakan dari instansi lain maupun dari lembaga pendidikan lainnya :

Dengan jumlah pegawai yang ada, banyak pegawai yang masih belum bisa mengikuti kesempatan untuk mengikuti baik diklat, bimtek maupun workshop karena keterbatasan kompetensi pendidikan minimal sebagai syarat untuk mengikuti diklat dimaksud. Meski demikian dinas tetap berupaya untuk selalu memberi motivasi dan berusaha mengajukan usulan kepada kementerian perhubungan terkait penyelenggaraan *in house training* di Kabupaten Ciamis.

g) Daftar Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop

Tabel 2. 7 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop

| No | Diklat/Bimtek/Workshop    | Jumlah (orang) | Penyelenggara                        |
|----|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | PPD RPD                   | 2              | BAPPENAS                             |
| 2. | Penyusunan LAKIP          | 2              | Bagian Organisasi Setda Kab.Ciamis   |
| 3. | Pengadaan Barang Dan Jasa | 2              | UNSOED                               |
| 4. | Aplikasi SIPKD            | 2              | BPKD                                 |
| 5. | Monevis                   | 1              | Bagian Pembangunan Setda Kab. Ciamis |
| 6. | e-Planning                | 2              | BAPPEDA                              |
| 7. | Akrual Basic              | 1              | BPKD                                 |
|    | <b>Jumlah</b>             | <b>12</b>      |                                      |

### 2.2.2 Asset/Modal

a) Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas jabatan pada Dinas Perhubungan tahun 2023 operasional tahun 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) unit kendaraan roda 2, 9 (sembilan) unit kendaraan roda 4, 2 (dua) unit kendaraan roda 6.

b) Gedung Kantor

Kantor Dinas Perhubungan saat ini menempati bangunan yang memang sudah disediakan untuk kantor Dinas Perhubungan dengan lokasi

ideal berdekatan dengan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan gedung kantor lainnya berupa terminal yaitu :

- Gedung Kantor UPTD Terminal Ciamis dan UPTD Pengelolaan Parkir serta bangunan Terminal Ciamis yang terletak di Jl. Letnan Samuji Ciamis;
- Gedung Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Otto Iskandardinata Lingkar Selatan-Benteng Ciamis;
- Bangunan Terminal Banjarsari terletak di Komplek Pasar Banjarsari
- Bangunan Terminal Sindangkasih yang terletak di Komplek Pasar Sindangkasih;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Pamokolan Jalan Raya Cihaurbeuti;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Panumbangan terletak di Jalan Raya Panumbangan-Panjalu;
- Bangunan Terminal Panjalu terletak di kompleks pasar Panjalu;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Cisaga terletak di Komplek Pasar Cisaga Jalan Raya Banjar – Ciamis;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Cibeureum terletak di Jalan Cibeureum- Sukamantri;
- Bangunan Terminal Cimaragas terletak di Jalan Raya Cimaragas – Banjar;
- Gedung Kantor dan bangunan Terminal Kawali terletak di Komplek Pasar Kawali;
- Gedung Kantor dan bangunan Terminal Rancah terletak di kompleks pasar Rancah.
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Pamarican

c) Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor yang ada perlu diperbaharui, mengingat ada beberapa meja dan kursi yang rusak berat. Namun sebagian besar masih dalam kategori cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja

pegawai. Dibawai ini kami sajikan jenis perlengkapan kantor yang ada dengan kondisinya .

*Tabel 2. 8 Jumlah Perlengkapan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis*

| NO | NAMA BARANG               | JUMLAH | KONDISI |       |
|----|---------------------------|--------|---------|-------|
|    |                           |        | BAIK    | RUSAK |
| 1  | Brankas                   | 2      | 1       | 1     |
| 2  | Mesin Absensi             | 1      | 1       | 0     |
| 3  | Kursi Besi/Material       | 3      | 3       | 0     |
| 4  | Meja Kayu                 | 3      | 3       | 0     |
| 5  | Sice                      | 4      | 4       | 0     |
| 6  | Meja Rapat                | 18     | 18      | 0     |
| 7  | Meja Tulis                | 42     | 28      | 14    |
| 8  | Kursi Rapat               | 132    | 117     | 15    |
| 9  | Kursi Tamu                | 2      | 2       | 0     |
| 10 | Kursi Putar               | 53     | 47      | 6     |
| 11 | Kursi Lipat               | 69     | 47      | 22    |
| 12 | Meja Komputer             | 4      | 4       | 0     |
| 13 | Sofa                      | 3      | 3       | 0     |
| 14 | Kursi Kerja               | 7      | 7       | 0     |
| 15 | Mesin Potong Rumput       | 2      | 0       | 2     |
| 16 | Tempat Sampah             | 3      | 3       | 0     |
| 17 | Lemari Es                 | 2      | 2       | 0     |
| 18 | AC                        | 14     | 12      | 2     |
| 19 | Alat Pendingin (AC Split) | 12     | 12      | 0     |
| 20 | Kipas Angin               | 14     | 7       | 5     |
| 21 | Kompor Gas                | 1      | 1       | 0     |
| 22 | Tabung Gas                | 1      | 1       | 0     |
| 23 | Dispenser                 | 8      | 7       | 1     |
| 24 | Microphone                | 2      | 2       | 0     |
| 25 | Microphone Table Stand    | 11     | 4       | 7     |
| 26 | Microphone/Wireless Mic   | 5      | 3       | 2     |
| 27 | Stand Microphone          | 2      | 2       | 0     |
| 28 | Tangga Aluminium          | 2      | 0       | 2     |
| 29 | Mesin Jilid               | 1      | 0       | 1     |
| 30 | Faximil                   | 1      | 1       | 0     |
| 31 | Screen                    | 1      | 1       | 0     |
| 32 | Mimbar pidato             | 1      | 1       | 0     |

*Sumber dari Aset Barang Dinas Perhubungan Tahun 2023*

Dari jumlah perlengkapan kantor tersebut tentunya perlu adanya penambahan perlengkapan kantor lainnya seperti genset, mengingat kantor

Dinas Perhubungan memiliki daya listrik yang tinggi serta perlunya meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

d) Peralatan Kantor

Peralatan kantor yang ada sementara cukup memadai namun perlu adanya peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dibawah ini peralatan kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab para pegawai seperti disajikan pada tabel berikut :

*Tabel 2. 9 Jumlah Peralatan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis*

| NO | NAMA BARANG          | JUMLAH | KONDISI |       |
|----|----------------------|--------|---------|-------|
|    |                      |        | BAIK    | RUSAK |
| 1  | Kursi Kerja Pegawai  | 30     | 26      | 4     |
| 2  | Kursi Kerja Pejabat  | 33     | 23      | 10    |
| 3  | Meja Kerja           | 16     | 16      | 0     |
| 4  | Meja Biro            | 45     | 31      | 14    |
| 5  | Lemari Besi          | 15     | 11      | 4     |
| 6  | Filling Besi/Metal   | 13     | 10      | 3     |
| 7  | Lemari Kaca          | 4      | 4       | 0     |
| 8  | Lemari Kayu          | 6      | 4       | 2     |
| 9  | PC Unit/Komputer PC  | 101    | 88      | 13    |
| 10 | Laptop               | 35     | 32      | 3     |
| 11 | Printer              | 34     | 24      | 10    |
| 12 | Proyektor+attachment | 3      | 2       | 1     |
| 13 | Camera               | 4      | 4       | 0     |
| 14 | Mesin Foto Copy      | 6      | 6       | 0     |

*Sumber dari Aset Barang Dinas Perhubungan Tahun 2023*

### 2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

#### a) Terminal

Fasilitas perhubungan di Kabupaten Ciamis terdiri dari terminal dan halte. Jumlah lokasi terminal dan halte di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 2. 10 Data Terminal Angkutan Jalan Di Kabupaten Ciamis*

| NO | NAMA TERMINAL         | TIPE | LOKASI            | KONDISI                                      |
|----|-----------------------|------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Terminal Ciamis       | C    | Kec. Ciamis       | Baik                                         |
| 2  | Terminal Cisaga       | C    | Kec. Cisaga       | Baik                                         |
| 3  | Terminal Cimaragas    | C    | Kec. Cimaragas    | Tidak Ada                                    |
| 4  | Terminal Sindangkasih | C    | Kec. Sindangkasih | Baik                                         |
| 5  | Terminal Pamokolan    | C    | Kec. Cihaurbeuti  | Baik                                         |
| 6  | Terminal Panumbangan  | C    | Kec. Panumbangan  | Baik                                         |
| 7  | Terminal Kawali       | C    | Kec. Kawali       | Baik                                         |
| 8  | Terminal Rancah       | C    | Kec. Rancah       | Baik                                         |
| 9  | Terminal Panjalu      | C    | Kec. Panjalu      | Masih menggunakan lahan parkir pasar Panjalu |
| 10 | Terminal Cibeureum    | C    | Kec. Sukamantri   | Perlu penertiban operasional Terminal        |
| 11 | Terminal Banjarsari   | C    | Kec. Banjarsari   | Perlu revitalisasi                           |
| 12 | Terminal Pamarican    | C    | Kec. Pamarican    | Baik                                         |

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan kampanye keselamatan jalan, menyelenggarakan pelayanan perizinan angkutan penumpang umum, menyelenggarakan pelayanan di terminal dan melaksanakan pengawasan operasional kendaraan angkutan penumpang umum baik di ruas jalan maupun di terminal.

#### **1. Sarana Angkutan**

Penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 5 kelompok pelayanan, yaitu :

- Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 434 unit, meskipun Kabupaten Ciamis bukan sebagai titik simpul perjalanan trayek AKAP, namun banyak kendaraan angkutan penumpang umum trayek AKAP baik bus sedang maupun bus besar route trayeknya melewati Kabupaten Ciamis. Ini dikarenakan jalan nasional di Kabupaten Ciamis merupakan jalur utama di bagian selatan pulau Jawa.
- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) ada sebanyak 520 unit, terdiri dari bus besar 17 unit bus sedang 57 unit dan bus kecil 446. Untuk trayek AKDP Kabupaten Ciamis sebagai simpul perjalanan kendaraan angkutan penumpang dari dan ke Ciamis.
- Angkutan Kota ada sebanyak 354 unit yang melayani wilayah Ciamis kota terdiri dari 13 jaringan trayek.
- Angkutan Perdesaan ada sebanyak 271 unit yang melayani wilayah perdesaan di Kabupaten Ciamis terdiri dari 19 jaringan trayek.
- Angkutan Perbatasan ada sebanyak 358 unit yang melayani Kabupaten Ciamis dengan beberapa daerah perbatasan terdiri dari 23 jaringan trayek.



## 2. Rambu-Rambu Lalu Lintas

Hasil capaian dari tahun awal capaian renstra tingkat capaiannya tiap tahun mengalami peningkatan target, walaupun di 5 tahun terakhir realisasi tidak dapat melalui target, tetapi disetiap tahunnya mengalami peningkatan, penambahan Rambu lalu lintas yang didanai oleh APBD Kabupaten juga, adanya tenaga teknis dari Kementerian Perhubungan. Capaiannya dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini :

*Tabel 2. 11 Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas Yang Sudah Dipasang di Kabupaten Ciamis*

| Tahun | Uraian    | Pemasangan rambu-rambu |
|-------|-----------|------------------------|
| 2019  | Target    | 817 Unit               |
|       | Realisasi | 797 Unit               |
| 2020  | Target    | 870 Unit               |
|       | Realisasi | 850 Unit               |
| 2021  | Target    | 1465 Unit              |
|       | Realisasi | 1445 Unit              |
| 2022  | Target    | 1493 Unit              |
|       | Realisasi | 1473 Unit              |
| 2023  | Target    | 1507 Unit              |
|       | Realisasi | 1487 Unit              |

*Sumber dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2023*

## 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)

*Tabel 2. 12 Lokasi Kegiatan Pengadaan Traffic Light*

| NO | Lokasi                | Volume    | Status Jalan |
|----|-----------------------|-----------|--------------|
| 1  | Simpang 4 Sudirman    | 1 Simpang | Nasional     |
| 2  | Simpang 4 Juanda      | 1 Simpang | Nasional     |
| 3  | Simpang 3 Ahmad Yani  | 1 Simpang | Nasional     |
| 4  | Simpang 4 Yos Sudarso | 1 Simpang | Nasional     |
| 5  | Simpang 4 Rumah Sakit | 1 Simpang | Nasional     |

| NO | Lokasi                     | Volume    | Status Jalan       |
|----|----------------------------|-----------|--------------------|
| 6  | Simpang 3 Alun-alun Ciamis | 1 Simpang | Nasional           |
| 7  | Simpang 3 Martadinata      | 1 Simpang | Nasional           |
| 8  | Simpang 3 Pahlawan         | 1 Simpang | Nasional           |
| 9  | Simpang 4 Tonjong          | 1 Simpang | Nasional           |
| 10 | Simpang 4 Lokasana         | 1 Simpang | Nasional           |
| 11 | Simpang 4 Cihaurbeuti      | 1 Simpang | Nasional           |
| 12 | Simpang 3 Sindangkasih     | 1 Simpang | Nasional           |
| 13 | Simpang 4 Cirahong         | 1 Simpang | Prioritas Provinsi |

Sumber dari Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Tahun 2023

#### 4. Penerangan Jalan Umum

Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara menurut laporan hasil pelaksanaan Tahun 2023 terdapat 917 titik yang dipelihara dilokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Ciamis. Rincian perbandingan terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum digambarkan pada tabel 2.13 dibawah ini :

*Tabel 2. 13 Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara*

| Tahun | Uraian    | Penerangan Jalan Umum yang dipelihara |
|-------|-----------|---------------------------------------|
| 2019  | Target    | 500 Unit                              |
|       | Realisasi | 500 Unit                              |
| 2020  | Target    | 650 Unit                              |
|       | Realisasi | 751 Unit                              |
| 2021  | Target    | 650 Unit                              |
|       | Realisasi | 695 Unit                              |
| 2022  | Target    | 500 Unit                              |
|       | Realisasi | 718 Unit                              |
| 2023  | Target    | 850 Unit                              |
|       | Realisasi | 917 Unit                              |

Sumber dari Bidang Teksar Dinas Perhubungan Tahun 2023

Capaian tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, karena pekerjaan pemeliharaan penerangan jalan umum berdasarkan banyaknya laporan dari Desa dan Kecamatan didukung oleh ketersediaan Anggaran.

#### 5. Halte/Shelter

Fasilitas prasarana halte yang ada selain dari APBD Kabupaten Ciamis juga dibangun oleh pihak swasta. Meski pada tahun 2023 realisasi tidak mencapai target pembangunan halte/shelter karena terdampak anggaran yang di rasionalisasi namun capaian indikator ini secara keseluruhan bertambah dari tahun sebelumnya sesuai pada tabel 2.14 dibawah ini :

Tabel 2. 14 Perbandingan Jumlah Halte

| Tahun | Uraian    | Halte/Shelter |
|-------|-----------|---------------|
| 2019  | Target    | 20            |
|       | Realisasi | 20            |
| 2020  | Target    | 21            |
|       | Realisasi | 21            |
| 2021  | Target    | 24            |
|       | Realisasi | 24            |
| 2022  | Target    | 24            |
|       | Realisasi | 24            |
| 2023  | Target    | 24            |
|       | Realisasi | 24            |

Sumber dari Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Tahun 2023

Dari capaian tersebut di atas dibawah ini lokasi halte/shelter seperti pada tabel berikut :

*Tabel 2. 15 Lokasi Halte/Shelter*

| No     | Halte / Shelter                    |                 |                            |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|        | Ruas Jalan                         | Volume (Lokasi) | Lokasi                     |
| 1      | Jl.Jend. Sudirman                  | 6               | SDN 1 Sindangrasa          |
|        |                                    |                 | SMP N 6 Ciamis             |
|        |                                    |                 | SMP N 3 Ciamis             |
|        |                                    |                 | SD N Janggala              |
|        |                                    |                 | SMK N 1 Ciamis             |
|        |                                    |                 | SMP N 5 Ciamis             |
| 2      | Jl.lwa K                           | 1               | Depan Organda              |
| 3      | Jl. Pasar Shubuh                   | 1               | Pasar Shubuh               |
| 4      | Jl. Ciptomangunkusumo              | 1               | SD N 7 Ciamis              |
| 5      | Jl.Tjokro                          | 1               | SD N 2 Ciamis              |
| 6      | Jl. Ir. H. Juanda                  | 2               | Taman Lokasana             |
|        |                                    |                 | Kancab BRI                 |
| 7      | Jl.Stasiun                         | 2               | Yogya Dept.Store           |
| 8      | Jl.RE.Martadinata                  | 1               | Kampus UNIGAL              |
| 9      | Jl. Yos Sudarso                    | 1               | Taman Yodas                |
| 10     | Ruas Jalan Ciamis-Cirebon (Kawali) | 1               | Taman Surawisesa           |
| 11     | Banjarsari                         | 1               | Masjid Agung               |
| 12     | Ruas Jalan Cisaga                  | 1               | Desa Mekar Mukti           |
| 13     | Ruas Jalan Cijeungjing             | 1               | Desa Bojong                |
| 14     | Jalan menuju ke Sukadana           | 1               | Depan Puskesmas Baregbeg   |
| 15     | Ruas Cimaragas                     | 1               | Komplek Terminal Cimaragas |
| 16     | Ruas Jalan Pamalayan               | 1               | SD N 1 Pamalayan           |
| 17     | Jl. Jenderal Soedirman             | 1               | SMK Bakti Kencana          |
| JUMLAH |                                    | 24              |                            |

Sumber dari Bidang Angkutan Tahun 2023

## 6. Alat Uji Kendaraan Bermotor

Adapun jenis alat uji yang digunakan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor tersebut yaitu :

- 1) Alat uji rem statis
- 2) Alat uji portable
- 3) Alat uji timbangan statis
- 4) Alat uji kincup roda depan
- 5) Alat uji lampu utama
- 6) Alat uji emisi gas buang (CoHC)
- 7) Alat uji ketebalan asap (smoke tester)
- 8) Alat uji kecepatan
- 9) Alat uji kebisingan
- 10) Alat uji tekanan ban
- 11) Alat uji pengukur dimensi
- 12) Play detector.

## 7. Moda Kereta Api

Moda kereta api merupakan sarana transportasi massal yang dinilai memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan kendaraan moda jalan raya, keunggulan ini dilihat dari penggunaan ruang yang hemat, tingkat keselamatan tinggi, tidak macet, hemat energi, dan ramah lingkungan. Di Kabupaten Ciamis ada 2 (dua) stasiun yang memfasilitasi mobilisasi masyarakat menggunakan moda kereta api yaitu di stasiun Ciamis di Kecamatan Ciamis dan Stasiun Bojong di Kecamatan Cijeungjing. Meskipun jumlah pengguna moda kereta api relatif sedikit namun keberadaan moda kereta api di Kabupaten Ciamis cukup membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan.

Berdasarkan data diatas bahwa capaian kinerja pelayanan bidang perhubungan yang diukur dari target dan realisasi selama kurun waktu Tahun 2019-2023 yang dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut ini:

*Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan*

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                       | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |        |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                  |             |            |                          | 2019                                      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2019                        | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Rasio Konektivitas Kabupaten                                                                     |             | 0,157      |                          | 0,157                                     | 0,157 | 0,157 | 0,248 | 0,248 | 0,157                       | 0,157 | 0,157  | 0,248 | 0,248 | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan type C              |             | 67,37      |                          | 67,37                                     | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 67,37                       | 67,37 | 67,37  | 79,56 | 79,56 | 100                          | 100  | 100  | 118  | 118  |
|    | Terlaksananya pelayanan uji berkala                                                              |             | 100        |                          | 100                                       | 100   | 100   | 100   | 100   | 109,95                      | 99,38 | 106,79 | 73,43 | 67,50 | 110                          | 99   | 107  | 73   | 68   |
|    | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten         |             | 25         |                          | 25                                        | 25    | 25    | 25    | 25    | 27,49                       | 29,76 | 34,02  | 36,03 | 36,70 | 110                          | 119  | 136  | 144  | 147  |
| 2  | V/C Ratio di Jalan Kabupaten                                                                     |             | 0,2        |                          | 0,2                                       | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,26                        | 0,28  | 0,28   | 0,30  | 0,30  | 130                          | 140  | 140  | 150  | 150  |
|    | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten (rambu) |             | 25         |                          | 25                                        | 25    | 25    | 25    | 25    | 22,79                       | 25,54 | 31,44  | 33,22 | 33,42 | 91                           | 102  | 126  | 133  | 134  |

|   |                                                           |        |  |  |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------|--------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 3 | Indeks Keselamatan Lalu Lintas                            | 96,807 |  |  |       | 93.716 | 93.75  | 95.163 | 96.393 | 89,135 | 93,716 | 93,750 | 90,424  | 96,902  |  |  |  |  |  |
|   | Presentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | 95,903 |  |  |       | 92.195 | 92.262 | 93.714 | 95.075 | 84,222 | 92,195 | 92,262 | 80,848  | 93,805  |  |  |  |  |  |
|   | Presentase Layanan Angkutan darat yang layak fungsi       | 97,711 |  |  |       | 95.238 | 95.238 | 96.612 | 97.711 | 94,048 | 95,238 | 95,238 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dishub                   | 80,65  |  |  | 85.25 | 85.30  | 85.35  | 85,40  | 85.45  | 86     | 84,31  | 79,52  | 80,59   | 87,994  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan                     | A      |  |  | BB    | BB     | BB     | BB     | BB     | BB     | BB     | BB     | B       | B       |  |  |  |  |  |
| 6 | Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan              | 3      |  |  | 3     | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 2,85   | 3       | 3       |  |  |  |  |  |

|   |                                                                 |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |        |        |        |  |  |  |        |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|
| 7 | Hasil Penilaian<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dinas<br>Perhubungan | 810 |  |  | 700 | 836 | 758 | 750 | 775 | 950 | 836 | 758,81 | 754,56 | 813,43 |  |  |  | 100.60 |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|



Dari capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan dapat disimpulkan bahwa Hanya satu Indikator Kinerja yang mengalami penurunan di dua tahun terakhir, yaitu Terlaksananya pelayanan uji berkala, dimana hal itu banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang tidak melaksanakan wajib uji berkala selama 6 bulan sekali, sehingga hal tersebut menjadi bahan perhatian lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Terdapat 5 (Lima) Indikator kinerja yang telah tercapainya sesuai target yang sudah ditentukan. Bahkan 4 (Empat) diantaranya melebihi target, seperti Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten dimana hal tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh terealisasinya Jumlah dan pemeliharaan rambu di 5 (Lima) Tahun terakhir

### 2.3.2 Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun dibawah ini dapat dilihat target dan realisasi pengelolaan pendapatan asli daerah di sektor perhubungan

*Tabel 2. 17 Jumlah Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*

| Tahun | Uraian    | Pendapatan Asli Daerah | Persentase Realisasi |
|-------|-----------|------------------------|----------------------|
| 2019  | Target    | 2.180.060.000          | 129,02%              |
|       | Realisasi | 2.812.718.100          |                      |
| 2020  | Target    | 2.737.051.000          | 94,31%               |
|       | Realisasi | 2.581.402.000          |                      |
| 2021  | Target    | 2.420.360.600          | 105,21%              |
|       | Realisasi | 2.546.467.700          |                      |
| 2022  | Target    | 2.856.721.000          | 92,33%               |
|       | Realisasi | 2.637.561.600          |                      |
| 2023  | Target    | 4.087.712.000          | 65,20%               |
|       | Realisasi | 2.665.138.800          |                      |

Dapat dilihat ditahun 2023 terjadi penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dikarenakan kenaikan Target hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya, walaupun di 2023 jumlah realisasi lebih besar dari tahun sebelumnya, tetap saja hasil presentase begitu kecil dikarenakan perbandingan target yang besar.

#### 2. Belanja Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perkembangan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2. 18 Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir

| Tahun | Uraian    | Alokasi Anggaran | Capaian Presentase Realisasi Keuangan |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------------|
| 2019  | Target    | 36.957.353.000   | 96,34%                                |
|       | Realisasi | 35.604.163.032   |                                       |
| 2020  | Target    | 76.434.744.000   | 96,06%                                |
|       | Realisasi | 73.420.520.435   |                                       |
| 2021  | Target    | 40.624.057.891   | 98,17%                                |
|       | Realisasi | 39.880.415.778   |                                       |
| 2022  | Target    | 58.307.301.416   | 56,69%                                |
|       | Realisasi | 33.053.268.843   |                                       |
| 2023  | Target    | 59.605.273.133   | 98,00%                                |
|       | Realisasi | 58.413.246.509   |                                       |

Dari tabel tersebut bahwa pada tahun 2020 secara keseluruhan total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.42.990.000.000 untuk kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, kegiatan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, kegiatan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berbasis ATCS, dan untuk tahun selanjutnya juga mendapatkan Bantuan keuangan Provinsi Jawa barat namun tidak sebesar tahun 2020

**Tabel 2. 19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Ciamis**

| Uraian                  | Anggaran pada Tahun ke- |                       |                       |                       |                       | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |                       |                       |                       |                       | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |             |             |             |             | Rata-rata Pertumbuhan |               |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
|                         | 2019                    | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2019                              | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2019                                          | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | Anggaran              | Realisasi     |
| 1                       | 2                       | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                                 | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    | 12                                            | 13          | 14          | 15          | 16          | 17                    | 18            |
| <b>Belanja Operasi</b>  | <b>30.093.779.600</b>   | <b>29.648.243.675</b> | <b>32.943.599.291</b> | <b>32.705.630.366</b> | <b>34.556.868.033</b> | <b>28.871.627.528</b>             | <b>26.997.371.995</b> | <b>32.380.181.477</b> | <b>31.814.881.500</b> | <b>33.559.542.979</b> | <b>0,96</b>                                   | <b>0,91</b> | <b>0,98</b> | <b>0,97</b> | <b>0,97</b> | <b>3,64</b>           | <b>4,30</b>   |
| Belanja Pegawai         | 8.355.998.000           | 7.625.930.200         | 7.091.342.091         | 7.045.205.916         | 7.267.623.133         | 8.186.943.656                     | 7.257.760.608         | 6.864.946.245         | 6.847.362.778         | 6.603.160.503         | 0,98                                          | 0,95        | 0,97        | 0,97        | <b>0,91</b> | <b>-3,31</b>          | -5,15         |
| Belanja Barang dan Jasa | 21.737.781.600          | 22.022.313.475        | 25.852.257.200        | 25.660.424.450        | 27.289.244.900        | 20.684.683.872                    | 19.739.611.387        | 25.515.235.232        | 24.967.518.722        | 26.956.382.476        | 0,95                                          | 0,90        | 0,99        | 0,97        | <b>0,99</b> | <b>6,08</b>           | 7,63          |
| <b>Belanja Modal</b>    | <b>6.546.073.400</b>    | <b>46.251.100.325</b> | <b>7.677.220.600</b>  | <b>25.601.671.050</b> | <b>25.048.405.100</b> | <b>6.415.035.504</b>              | <b>45.895.248.440</b> | <b>7.500.234.301</b>  | <b>1.238.387.343</b>  | <b>24.950.169.380</b> | <b>0,99</b>                                   | <b>0,99</b> | <b>0,98</b> | <b>0,05</b> | <b>1,00</b> | <b>188,62</b>         | <b>590,75</b> |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>36.639.853.000</b>   | <b>75.899.344.000</b> | <b>40.620.819.891</b> | <b>58.307.301.416</b> | <b>59.605.273.133</b> | <b>35.286.663.032</b>             | <b>72.892.620.435</b> | <b>39.880.415.778</b> | <b>33.053.268.843</b> | <b>58.509.712.359</b> | <b>0,96</b>                                   | <b>0,96</b> | <b>0,98</b> | <b>0,57</b> | <b>0,98</b> | <b>26,61</b>          | <b>30,30</b>  |

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis**

### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan yang dimiliki Dinas Perhubungan yang merupakan potensi yaitu :

- a) Kapasitas personil dinas yang cukup memadai yaitu sebanyak 222 aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai yang bestatus sebagai PNS maupun tenaga Non-PNS.
- b) Ketersediaan prasarana kerja seperti gedung kantor, gedung unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan terminal.
- c) Dukungan regulasi dalam menyelenggarakan urusan perhubungan didukung oleh Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.
- d) Dukungan koordinasi terhadap instansi terkait yang kondusif sesuai Keputusan Bupati Ciamis Nomor 555/Kpts.Kpts-Huk 2012 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **2. Kelemahan**

- a) Dari jumlah aparatur sipil negara yang ada di Dinas Perhubungan, pegawai yang memiliki kualifikasi teknis bidang perhubungan masih minim terutama untuk tenaga teknis penguji kendaraan bermotor, perencana transportasi darat, tenaga teknis pengelola terminal, tenaga teknis pelayanan perizinan angkutan, tenaga teknisi K3 Listrik (pemasangan PJU), tenaga teknis PPNS, tenaga penilai andalalin, tenaga audit keselamatan jalan.
- b) Pemeliharaan prasarana dan sarana kerja yang belum memadai baik di gedung kantor utama maupun di unit pelaksana teknis dinas, serta kendaraan operasional dan/atau kendaraan survey.

### **3. Tantangan**

- a) Menurunkan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas.
- b) Kemajuan teknologi merupakan tantangan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan diantaranya :

- Penggunaan *smart card* atau BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - Penerapan angkutan yang terintegrasi secara system yang dilengkapi dengan aplikasi pelayanan terhadap pengguna angkutan umum.
  - Pengembangan/pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas berbasis *area traffic control system* (ATCS).
- c) Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup pesat setiap tahunnya.
  - d) Fenomena beroperasinya angkutan umum dalam jaringan (angkutan *online*) dimana pelayanan angkutan konvensional belum optimal.
  - e) Keberadaan angkutan penumpang umum ilegal (tidak berijin) dan kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Load)

#### 4. Peluang

- a) Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam kampanye keselamatan lalu lintas baik melalui sosialisasi ke kabupaten/kota, pelaksanaan diklat dan bimtek serta pemberian media/alat peraga sosialisasi berupa leaflet, banner, helm keselamatan.
- b) Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk menekan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui forum lalu lintas angkutan jalan.
- c) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara terintegrasi dan komputerisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan memberikan bantuan berupa komputer dan software pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- d) Adanya kesempatan untuk mengusulkan kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan melalui dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perhubungan dan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat.
- e) Posisi strategis Kabupaten Ciamis setelah dibangunnya bandar udara internasional Kertajati di Majalengka dan jalan Tol Cileunyi- Garut-Tasik-Cilacap.
- f) Mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan wilayah Jabar bagian selatan.

## **2.5 Kelompok Sasaran Layanan**

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Unsur Pimpinan ( Bupati Ciamis, Wakil Bupati Ciamis, Sekretaris Daerah) Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah kecamatan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Penyidik dan Penindak Hukum yang berlaku.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/ unit kerja terkait Kolaborasi dengan instansi Dinas Perhubungan
4. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi Pembangunan
5. Organda yang selaku Organisasi Angkutan Darat dalam forum usaha angkutan umum
6. Perusahaan Angkutan Umum dan Angkutan Barang
7. Masyarakat selaku penerima langsung pelayanan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Urusan wajib non pelayanan dasar di bidang perhubungan terutama jasa transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena kebutuhan akan jasa transportasi merupakan kebutuhan turunan yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan bidang perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pergerakan orang dan barang yang dilakukan oleh masyarakat dalam menunjang aktifitas kegiatan sehari-hari.

Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, level of service ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas

Permasalahan bidang perhubungan secara umum dapat dilihat dalam tabel 3.1 yaitu

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | MASALAH POKOK                        | MASALAH                                                                                                                  | AKAR MASALAH                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Masih tingginya angka kecelakaan     | Terdapat beberapa faktor, diantaranya; faktor jalan, perlengkapan jalan, kendaraan, lingkungan dan manusia (human error) | Jalan yang tidak memiliki rambu, jalan berlubang, minimnya marka jalan dan penerangan jalan umum serta kurangnya sosialisasi keselamatan jalan                                                                                                         |
| 2. | Parkir tepi jalan umum belum optimal | Perlunya penataan fasilitas parkir pada tepi jalan umum dan pusat kegiatan atau fasilitas umum lainnya                   | Parkir di tepi jalan umum masih banyak yang belum dikelola dengan baik sehingga memunculkan masalah kemacetan Serta belum optimalnya target, dengan realisasi PAD dari pengelolaan parkir, di tahun 2023 hanya 8,46%, darti target Parkir Berlangganan |



|    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Semakin menurunnya daya tarik masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum | Belum optimalnya pelayanan angkutan penumpang umum di terminal                                          | Prasarana dan sarana transportasi, sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran Pengemudi akan pentingnya kelayakan kendaraan yang beroperasi. Ditahun 2023 sebanyak 30 orang Pengemudi mengikuti Bimtek Pengemudi angkutan Umum Berkeselamatan, jumlah itu masih jauh dari banyaknya jumlah Pengemudi angkutan umum di kabupaten ciamis sebesar 1.535 Pengemudi . |
|    |                                                                            | Menurunnya keinginan masyarakat menggunakan pelayanan angkutan umum                                     | Ketersediaan angkutan umum, waktu tunggu di terminal yang lama dan kondisi kendaraan angkutan yang kurang layak dan laik, serta kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin mudah dan banyak, Jumlah angkutan di Kabupaten Ciamis yang tidak melaksanakan Perpanjangan Izin Trayek di tahun 2023 Sebesar 95 Kendaraan.                                               |
| 4. | Pentingnya integrasi angkutan umum                                         | Belum maksimalnya operasional jaringan trayek                                                           | Jaringan trayek yang ada belum sepenuhnya terisi dan masih ada yang tidak beroperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor                    | Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum dilengkapi dengan teknologi informasi secara <i>online</i> | Belum tersedianya perlengkapan dan peralatan penunjang pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara online                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.2 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Dinas Perhubungan selalu berupaya

menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada dengan Peningkatan Aksesibilitas Konektivitas, Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan beberapa isu strategis sebagai berikut : Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ruas-ruas jalan Kabupaten yang dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) yang dilengkapi dengan alat ukur pemakaian (meterisasi)
2. Kurang optimalnya integrasi dan pelayanan angkutan penumpang umum di Kabupaten Ciamis
3. Kebutuhan aplikasi lokal untuk mengakomodir angkutan konvensional dalam persaingan usaha dengan angkutan dalam jaringan (online) yang merupakan perkembangan kemajuan ilmu teknologi.
4. Penerapan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan Angkutan Umum secara elektronik, sehingga para pengusaha angkutan umum dapat meminimalisir biaya perizinan angkutan serta sistem informasi angkutan dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Penerapan sistem pendaftaran pengujian secara *online* dan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara *Drive Thru*.
6. Isu keselamatan jalan dan kampanye keselamatan yang masih kurang maksimal karena terhambat kurangnya SDM dan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Pelanggaran kendaraan angkutan barang (ODOL)

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

##### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implentasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPD Kabupaten Ciamis, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas

##### **2. Sasaran**

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi sasaran yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah
4. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

*Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra*

| NO | TUJUAN                                                                                                            | INDIKATOR TUJUAN                        | SASARAN                                                                                                 | INDIKATOR SASARAN                                         | SATUAN   | REALISASI 2023 | TARGET |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                                   |                                         |                                                                                                         |                                                           |          |                | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata                                                     | Indeks keselamatan lalu lintas          |                                                                                                         |                                                           | %        | 96,902         | 96,949 | 97,400 | 97,415 |
|    |                                                                                                                   |                                         | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | %        | 93,805         | 93,899 | 94,801 | 94,830 |
|    |                                                                                                                   |                                         |                                                                                                         | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | %        | 100            | 100    | 100    | 100    |
| 2. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah |                                                                                                         |                                                           | Mutu     | Baik           | Baik   | Baik   | Baik   |
|    |                                                                                                                   |                                         | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah                                                 | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan        | Point    | 87,994         | 87,994 | 87,995 | 87,996 |
|    |                                                                                                                   | Hasil Evaluasi AKIP Daerah              |                                                                                                         |                                                           | Predikat | BB             | BB     | BB     | A      |

|  |  |                             |                                                                                                                                                                                |                                                        |          |        |        |       |        |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|  |  |                             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan                  | Point    | B      | BB     | BB    | A      |
|  |  | Maturitas SPIP Daerah       |                                                                                                                                                                                |                                                        | Level    | 3      | 3      | 3     | 3      |
|  |  |                             | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan           | Level    | 3      | 3      | 3     | 3      |
|  |  | Kualitas Pelaporan Keuangan |                                                                                                                                                                                |                                                        | Predikat | WTP    | WTP    | WTP   | WTP    |
|  |  |                             | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah                                                                                                                    | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan | Point    | 813,43 | 813,45 | 813,5 | 813,75 |

## 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Adapun rincian cascading kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 2 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan

| No | Tujuan                                                        | Indikator Tujuan               | Sasaran                                                                                                 | Indikator Sasaran                                         | Program                                                         | Kegiatan                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Indeks keselamatan lalu lintas | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | Penunjang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                              | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |
|    |                                                               |                                |                                                                                                         |                                                           |                                                                 |                                                                                    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   |
|    |                                                               |                                |                                                                                                         |                                                           |                                                                 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
|    |                                                               |                                |                                                                                                         |                                                           |                                                                 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas               |

|  |  |  |  |                                              |                                                                                      |                                                                                          |
|--|--|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                              |                                                                                      | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota |
|  |  |  |  |                                              |                                                                                      | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                      |
|  |  |  |  |                                              | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin                                                  |
|  |  |  |  |                                              |                                                                                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                    |
|  |  |  |  |                                              |                                                                                      | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                             |
|  |  |  |  | Persentase layanan angkutan darat yang layak | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C                                 |



|  |  |  |  |        |  |                                              |                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | fungsi |  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    |
|  |  |  |  |        |  |                                              | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                         |
|  |  |  |  |        |  |                                              | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                  |
|  |  |  |  |        |  |                                              | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                         |
|  |  |  |  |        |  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |

|   |                                                                                                                   |                                  |                                                         |                                                    |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                   |                                  |                                                         |                                                    |                                                             | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
|   |                                                                                                                   |                                  |                                                         |                                                    |                                                             | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                    |
|   |                                                                                                                   |                                  |                                                         |                                                    |                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                          |

|  |  |  |  |  |  |                                                                  |                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                 |
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                                    |
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                         |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan            |
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                          |
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya           |
|  |  |  |  |  |  |                                                                  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                      |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                            |                                  |  |                                                                     |                                                                                                                 |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                                                                                            |                                  |  | Daerah                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |
|  |  |                     |                                                                                                                                                                            |                                  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
|  |  |                     |                                                                                                                                                                            |                                  |  |                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                               |
|  |  | Hasil Evaluasi AKIP | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan |  | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           |

|  |  |                                      |                                                                                                                                                                                |                                             |  |                                        |                                                             |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |  | Maturitas SPIP                       | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan      |  |                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |
|  |  |                                      |                                                                                                                                                                                |                                             |  |                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  |
|  |  |                                      |                                                                                                                                                                                |                                             |  |                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD        |
|  |  | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah                                                                                                                    | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN                           |
|  |  |                                      |                                                                                                                                                                                |                                             |  |                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|  |  |                                      |                                                                                                                                                                                |                                             |  |                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Semesteran       |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang memuat program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi daerah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD .

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

| No | Tujuan                                                        | Sasaran                                                                                                 | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Optimalisasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ |
|    |                                                               |                                                                                                         |                                                                    | Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor                 |
|    |                                                               |                                                                                                         |                                                                    | Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas        |
|    |                                                               |                                                                                                         |                                                                    | Meningkatkan pelayanan angkutan umum                                   |
|    |                                                               |                                                                                                         |                                                                    | Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum        |

|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                     |                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2. | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas                                                                           | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah                                       | Peningkatan sistem Pelayanan Publik | Peningkatan dukungan administrasi perkantoran                    |
|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                     | Peningkatan dukungan ketercakupan sarana dan prasarana           |
|    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah      | Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian |                                     | Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan         |
|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                     | Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan                    |
|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                     | Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan |
|    | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan         |                                     | Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan         |
|    | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    | Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan            |                                     | Optimalisasi penyusunan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah    |

Untuk Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik maka perlu Optimalisasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) adanya Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas LLAJ Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Meningkatkan pelayanan angkutan umum, Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDANAAN**

Dinas Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam pencapaian tujuan dimaksud Dinas Perhubungan melaksanakan program kegiatan non urusan dan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan non urusan dan urusan wajib adalah sebagai berikut :

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tersebut diatas merupakan program prioritas RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD .

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya daftar rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 secara rinci tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

| Tujuan                                                                     | Sasaran                                                                                   | Kode    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |              |                |                                                             |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       |                                                                       |                                          | Tahun 2025                             |                | Tahun 2026   |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       |                                                                       |                                          | Target                                 | Rp             | Target       | Rp             | Target                                                      | Rp             |                                              |        |
| 1                                                                          | 2                                                                                         | 3       | 4                                                                     | 5                                                                     | 6                                        | 7                                      | 8              | 9            | 10             | 11                                                          | 12             | 13                                           | 14     |
|                                                                            |                                                                                           | 2       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                       |                                          |                                        |                |              |                |                                                             |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           | 2 15    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |                                                                       |                                          |                                        | 31.252.020.000 |              | 32.431.380.000 |                                                             | 63.683.400.000 |                                              |        |
| Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel |                                                                                           |         |                                                                       | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                   | Mutu Baik                                | Mutu Baik                              |                | Mutu Baik    |                | Mutu Baik                                                   |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 2. Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)                                        | Predikat BB                              | Predikat BB                            |                | Predikat A   |                | Predikat A                                                  |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 3. Maturitas SPIP                                                     | Level 3                                  | Level 3                                |                | Level 3      |                | Level 3                                                     |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 4. Opini BPK (TPB16)                                                  | Predikat WTP                             | Predikat WTP                           |                | Predikat WTP |                | Predikat WTP                                                |                |                                              |        |
|                                                                            | Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah |         |                                                                       | 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan                 | 87,994 Point                             | 87,995 Point                           |                | 87,996 Point |                | 87,996 Point                                                |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 2. Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan                              | Predikat B                               | Predikat BB                            |                | Predikat A   |                | Predikat A                                                  |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 3. Maturitas SPIP Dinas Perhubungan                                   | Level 3                                  | Level 3                                |                | Level 3      |                | Level 3                                                     |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 4. Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan                 | 813,43 Point                             | 813,5                                  |                | 813,75       |                | 813,75                                                      |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           | 2 15 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |                                                                       |                                          |                                        | 24.705.705.000 |              | 25.627.412.400 |                                                             | 50.333.117.400 |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 1. Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan          | 100%                                     | 100%                                   | 16.878.275.000 | 100%         | 17.771.744.400 | 100%                                                        | 34.650.019.400 |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 2. Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur         | 100%                                     | 100%                                   | 632.450.000    | 100%         | 657.748.000    | 100%                                                        | 1.290.198.000  |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       | 3. Persentase laporan kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan          | 100%                                     | 100%                                   | 7.194.980.000  | 100%         | 7.197.920.000  | 100%                                                        | 14.392.900.000 |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       |                                                                       |                                          |                                        |                |              |                |                                                             |                |                                              |        |
|                                                                            |                                                                                           |         |                                                                       |                                                                       |                                          |                                        |                |              |                |                                                             |                |                                              |        |

|                 |                                                                                       |                                                                                                                                                           |                  |                  |                      |                  |                      |                  |                       |        |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| 2 15 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>                                                                                     | <b>9 Dokumen</b> | <b>9 Dokumen</b> | <b>14.320.000</b>    | <b>9 Dokumen</b> | <b>14.320.000</b>    | <b>9 Dokumen</b> | <b>28.640.000</b>     |        |                      |
| 2 15 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               | 4 dokumen        | 3 dokumen        | 3.580.000            | 2 dokumen        | 3.580.000            | 5 dokumen        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          | 1 dokumen        | 1 dokumen        | 3.580.000            | 1 dokumen        | 3.580.000            | 2 dokumen        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                      | 1 dokumen        | 1 dokumen        | 3.580.000            | 1 dokumen        | 3.580.000            | 2 dokumen        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                          | -                | 1 dokumen        | 3.580.000            | 1 dokumen        | 3.580.000            | 2 dokumen        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                      | -                | 1 dokumen        | 3.580.000            | 1 dokumen        | 3.580.000            | 2 dokumen        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 3 Laporan        | 2 Laporan        | 3.580.000            | 2 Laporan        | 3.580.000            | 4 Laporan        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan</b>                                                                                                                    | <b>3 Dokumen</b> | <b>3 Dokumen</b> | <b>7.107.160.000</b> | <b>3 Dokumen</b> | <b>7.107.160.000</b> | <b>3 Dokumen</b> | <b>14.214.320.000</b> |        |                      |
| 2 15 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 75 Orang/bulan   | 75 Orang/bulan   | 7.100.000.000        | 75 Orang/bulan   | 7.100.000.000        | 75 Orang/bulan   | 14.200.000.000        | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        | 1 laporan        | 1 laporan        | 3.580.000            | 1 laporan        | 3.580.000            | 2 laporan        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD              | 1 laporan        | 1 laporan        | 3.580.000            | 1 laporan        | 3.580.000            | 2 laporan        | 7.160.000             | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |

|                 |                                                                              |                                                                                                |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                      |        |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------|----------------------|
| 2 15 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>Jumlah aparatur perencana yang terdidik dan terlatih</b>                                    | -               | <b>73 Orang</b> | <b>73.500.000</b>  | <b>73 Orang</b> | <b>76.440.000</b>  | <b>73 Orang</b> | <b>149.940.000</b>   |        |                      |
| 2 15 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                         | -               | 1 Paket         | 73.500.000         | 1 Paket         | 76.440.000         | 2 Paket         | 149.940.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> | <b>505.247.000</b> | <b>12 Bulan</b> | <b>525.456.000</b> | <b>12 Bulan</b> | <b>1.030.703.000</b> |        |                      |
| 2 15 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket         | 1 Paket         | 43.050.000         | 1 Paket         | 44.772.000         | 2 Paket         | 87.822.000           | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket         | 3 Paket         | 86.000.000         | 3 Paket         | 89.440.000         | 6 Paket         | 175.440.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 1 Paket         | 2 Paket         | 69.597.000         | 2 Paket         | 72.380.000         | 4 Paket         | 141.977.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1 Paket         | 1 Pakett        | 105.000.000        | 1 Pakett        | 109.200.000        | 2 Pakett        | 214.200.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                   | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       | 19.600.000         | 1 Dokumen       | 20.384.000         | 2 Dokumen       | 39.984.000           | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 Laporan       | 1 Laporan       | 182.000.000        | 1 Laporan       | 189.280.000        | 2 Laporan       | 371.280.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara</b>                                   | <b>100 %</b>    | <b>100 %</b>    | <b>392.600.000</b> | <b>100 %</b>    | <b>408.304.000</b> | <b>100 %</b>    | <b>800.904.000</b>   |        |                      |
| 2 15 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | -               | 1 Unit          | 250.000.000        | 1 Unit          | 260.000.000        | 2 Unit          | 510.000.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | -               | 1 Unit          | 60.000.000         | 1 Unit          | 62.400.000         | 2 Unit          | 122.400.000          |        | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit          | 2 Unit          | 44.100.000         | 2 Unit          | 45.864.000         | 4 Unit          | 89.964.000           | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit          | 5 Unit          | 38.500.000         | 5 Unit          | 40.040.000         | 10 Unit         | 78.540.000           | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |

|                                                                                                         |  |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        |                 |                 |                       |                 |                       |                 |                       |        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
|                                                                                                         |  | 2 15 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Waktu pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                          | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> | <b>16.373.028.000</b> | <b>12 Bulan</b> | <b>17.246.288.400</b> | <b>12 Bulan</b> | <b>33.619.316.400</b> |        |                      |
|                                                                                                         |  | 2 15 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       | 1 Laporan       | 14.700.000.000        | 1 Laporan       | 15.573.260.400        | 2 Laporan       | 30.273.260.400        | DISHUB | Kab. Ciamis          |
|                                                                                                         |  | 2 15 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 1 Laporan       | 1.673.028.000         | 1 Laporan       | 1.673.028.000         | 2 Laporan       | 3.346.056.000         | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
|                                                                                                         |  | 2 15 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpeliharanya</b>             | <b>29 Unit</b>  | <b>31 Unit</b>  | <b>239.850.000</b>    | <b>31 Unit</b>  | <b>249.444.000</b>    | <b>31 Unit</b>  | <b>489.294.000</b>    |        |                      |
|                                                                                                         |  | 2 15 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 28 Unit         | 30 Unit         | 183.750.000           | 30 Unit         | 191.100.000           | 30 Unit         | 374.850.000           | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
|                                                                                                         |  | 2 15 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit          | 1 Unit          | 56.100.000            | 1 Unit          | 58.344.000            | 1 Unit          | 114.444.000           | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata                                           |  |                 |                                                                                                                    | Indeks keselamatan lalu lintas                                                                         | 96,902          | 97,400          |                       | 97,415          |                       | 97,415          |                       |        |                      |
| Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik |  |                 |                                                                                                                    | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi                                              | 93,805          | 94,801          |                       | 94,830          |                       | 94,830          |                       |        |                      |
|                                                                                                         |  |                 |                                                                                                                    | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi                                                    | 100,000         | 100,000         |                       | 100,000         |                       | 100,000         |                       |        |                      |
|                                                                                                         |  |                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                      |                                                                                                        |                 |                 | 6.546.315.000         |                 | 6.803.967.600         |                 | 13.220.282.600        |        |                      |
|                                                                                                         |  | 2 15 02         |                                                                                                                    | 1. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan                                                             | 56,134          | 52,281          | 2.904.815.000         | 53,513          | 3.021.007.600         | 55,894          | 5.925.822.600         |        |                      |
|                                                                                                         |  |                 |                                                                                                                    | 2. Persentase Layanan Angkutan Darat                                                                   | 53,093          | 53,526%         | 3.641.500.000         | 53,757%         | 3.782.960.000         | 53,757%         | 7.294.460.000         |        |                      |
|                                                                                                         |  | 2 15 02 2.02    | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                       | <b>Persentase pemenuhan Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik</b>                                   | <b>42,450 %</b> | <b>42,921 %</b> | <b>1.392.815.000</b>  | <b>43,393 %</b> | <b>1.448.527.600</b>  | <b>43,393 %</b> | <b>2.841.342.600</b>  |        |                      |
|                                                                                                         |  | 2 15 02 2.02 01 | Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                          | -               | 1 Unit          | 45.000.000            | 1 Unit          | 46.800.000            | 2 Unit          | 91.800.000            | DISHUB | Kab. Ciamis          |

|                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |              |              |                      |              |                      |              |                      |        |                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 15 02 2.02 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                     | 253 Unit     | 80 Unit      | 671.000.000          | 80 Unit      | 697.840.000          | 160 Unit     | 1.368.840.000        | DISHUB | Kab. Ciamis                                                                                  |
| 2 15 02 2.02 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                          | 917 Unit     | 500 Unit     | 676.815.000          | 500 Unit     | 703.887.600          | 1.000 Unit   | 1.380.702.600        | DISHUB | Kab. Ciamis                                                                                  |
| 2 15 02 2.03    | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>                                                                                       | <b>Persentase Terminal Dalam Kondisi Baik</b>                                                                                                       | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>2.302.500.000</b> | <b>100 %</b> | <b>2.394.600.000</b> | <b>100 %</b> | <b>4.697.100.000</b> |        |                                                                                              |
| 2 15 02 2.03 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C                                                                           | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe c yang disusun                                                                                   | 1 Dokumen    | 1 Dokumen    | 77.500.000           | 1 Dokumen    | 80.600.000           | 2 Dokumen    | 158.100.000          | DISHUB | Kec. Banjarsari, Kec. Cimaragas                                                              |
| 2 15 02 2.03 02 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                      | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                       | -            | 1 Unit       | 1.220.000.000        | 1 Unit       | 1.268.800.000        | 2 Unit       | 2.488.800.000        | DISHUB | Kec. Purwadadi, Kec. Banjarsari                                                              |
| 2 15 02 2.03 03 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                       | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                                 | -            | 1 Unit       | 780.000.000          | 1 Unit       | 811.200.000          | 2 Unit       | 1.591.200.000        | DISHUB | Kec. Sukamantri, Kec. Rancah                                                                 |
| 2 15 02 2.03 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                      | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara                                                          | -            | 1 Unit       | 225.000.000          | 1 Unit       | 234.000.000          | 2 Unit       | 459.000.000          | DISHUB | Kec. Kawali, Kec. Pamarican, Kec. Cimaragas, Kec. Cihaurbeuti, Kec. Panumbangan, Kec. Cisaga |
| 2 15 02 2.04    | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>                                                            | <b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir</b>                                                                                      | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>164.000.000</b>   | <b>100 %</b> | <b>170.560.000</b>   | <b>100 %</b> | <b>334.560.000</b>   |        |                                                                                              |
| 2 15 02 2.04 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbanggunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan   | 12 Laporan   | 164.000.000          | 12 Laporan   | 170.560.000          | 24 Laporan   | 334.560.000          | DISHUB | Kab. Ciamis                                                                                  |
| 2 15 02 2.05    | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>                                                                                        | <b>Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji</b>                                                                                                 | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>491.000.000</b>   | <b>100 %</b> | <b>506.440.000</b>   | <b>100 %</b> | <b>997.440.000</b>   |        |                                                                                              |
| 2 15 02 2.05 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                      | 1 Unit       | 1 Unit       | 64.500.000           | 1 Unit       | 67.080.000           | 2 Unit       | 131.580.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis                                                                         |

|                 |                                                                                             |                                                                                                                      |              |              |                      |              |                      |               |                      |        |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
| 2 15 02 2.05 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya                       | -            | 1 Orang      | 35.000.000           | 1 Orang      | 36.400.000           | 2 orang       | 71.400.000           | DISHUB | Kab. Ciamis          |
| 2 15 02 2.05 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                             | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                  | 2835 Dokumen | 4200 Dokumen | 105.000.000          | 4200 Dokumen | 105.000.000          | 8.400 Dokumen | 210.000.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 02 2.05 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                    | 12 Unit      | 12 Unit      | 210.000.000          | 12 Unit      | 218.400.000          | 12 Unit       | 428.400.000          | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 02 2.05 08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                             | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                       | 12 Laporan   | 12 Laporan   | 76.500.000           | 12 Laporan   | 79.560.000           | 60 Laporan    | 156.060.000          | DISHUB | Kab. Ciamis          |
| 2 15 02 2.06    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dikelola</b>                   | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>1.222.000.000</b> | <b>100 %</b> | <b>1.270.880.000</b> | <b>100 %</b>  | <b>2.492.880.000</b> |        |                      |
| 2 15 02 2.06 02 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 48 Unit      | 49 unit      | 649.500.000          | 50 Unit      | 675.480.000          | 72 Unit       | 1.324.980.000        | DISHUB | Kab. Ciamis          |
| 2 15 02 2.06 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota    | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota              | 12 Laporan   | 12 Laporan   | 530.500.000          | 12 Laporan   | 551.720.000          | 24 Laporan    | 1.082.220.000        | DISHUB | Kab. Ciamis          |
| 2 15 02 2.06 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                    | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                              | 4 Laporan    | 3 Laporan    | 42.000.000           | 3 Laporan    | 43.680.000           | 6 Laporan     | 85.680.000           | DISHUB | Kel. Benteng, Ciamis |
| 2 15 02 2.07    | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>                           | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>126.000.000</b>   | <b>100 %</b> | <b>131.040.000</b>   | <b>100 %</b>  | <b>257.040.000</b>   |        |                      |
| 2 15 02 2.07 02 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                    | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                          | -            | 1 orang      | 35.000.000           | 1 orang      | 36.400.000           | 2 orang       | 71.400.000           | DISHUB | Kab. Ciamis          |

|                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |              |                    |              |                    |              |                    |        |                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------|
| 2 15 02 2.07 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                     | 12 Laporan   | 12 Laporan   | 45.500.000         | 12 Laporan   | 47.320.000         | 24 Laporan   | 92.820.000         | DISHUB | Kab. Ciamis        |
| 2 15 02 2.07 04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                                                                              | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawas                                                                                     | 12 Laporan   | 12 Laporan   | 45.500.000         | 12 Laporan   | 47.320.000         | 24 Laporan   | 92.820.000         | DISHUB | Kab. Ciamis        |
| 2 15 02 2.08    | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                                                                          | <b>Persentase Unit Pelaksana Keselamatan LLAJ di Jalan yang diaudit dan diinspeksi</b>                                                                   | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>252.000.000</b> | <b>100 %</b> | <b>262.080.000</b> | <b>100 %</b> | <b>514.080.000</b> |        |                    |
| 2 15 02 2.08 01 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                                                   | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                               | -            | 1 Orang      | 35.000.000         | 1 Orang      | 36.400.000         | 2 Orang      | 71.400.000         | DISHUB | Kab. Ciamis        |
| 2 15 02 2.08 02 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                          | -            | 1 Laporan    | 35.000.000         | 1 Laporan    | 36.400.000         | 2 Laporan    | 71.400.000         | DISHUB | Kel. Benteng, Cian |
| 2 15 02 2.08 03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal                                                                                                                          | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                   | -            | 6 Laporan    | 31.500.000         | 6 Laporan    | 32.760.000         | 12 Laporan   | 64.260.000         | DISHUB | Kab. Ciamis        |
| 2 15 02 2.08 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota               | 1 Laporan    | 1 Laporan    | 112.000.000        | 1 Laporan    | 116.480.000        | 2 Laporan    | 228.480.000        | DISHUB | Kab. Ciamis        |
| 2 15 02 2.08 05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                             | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                      | -            | 6 Laporan    | 38.500.000         | 6 Laporan    | 40.040.000         | 12 Laporan   | 78.540.000         | DISHUB | Kab. Ciamis        |
| 2 15 02 2.09    | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b>Persentase Ketersediaan Angkutan Umum yang beroperasi</b>                                                                                             | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>156.000.000</b> | <b>100 %</b> | <b>162.240.000</b> | <b>100 %</b> | <b>318.240.000</b> |        |                    |
| 2 15 02 2.09 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                             | -            | 500 unit     | 78.000.000         | 500 unit     | 81.120.000         | 500 unit     | 159.120.000        | DISHUB | Kab. Ciamis        |
| 2 15 02 2.09 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan   | 12 Laporan   | 78.000.000         | 12 Laporan   | 81.120.000         | 12 Laporan   | 159.120.000        | DISHUB | Kab. Ciamis        |



|                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |   |            |             |            |             |            |             |        |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 2 15 02 2.11    | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   | <b>Persentase Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan</b>                                                                                               | - | 100 %      | 142.500.000 | 100 %      | 148.200.000 | 100 %      | 290.700.000 |        |             |
| 2 15 02 2.11 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | - | 1 dokumen  | 55.000.000  | 1 dokumen  | 57.200.000  | 2 dokumen  | 112.200.000 | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 15 02 2.11 02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | - | 1 dokumen  | 45.500.000  | 1 dokumen  | 47.320.000  | 2 dokumen  | 92.820.000  | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 15 02 2.11 03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | - | 1 Dokumen  | 42.000.000  | 1 Dokumen  | 43.680.000  | 2 Dokumen  | 85.680.000  | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 15 02 2.12    | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                    | <b>Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan</b>                                                                                   | - | 100 %      | 80.500.000  | 100 %      | 83.720.000  | 100 %      | 164.220.000 |        |             |
| 2 15 02 2.12 01 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota                                                                                                            | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | - | 1 Dokumen  | 45.500.000  | 1 Dokumen  | 47.320.000  | 2 Dokumen  | 92.820.000  | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 15 02 2.12 02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | - | 4 Dokumen  | 35.000.000  | 4 Dokumen  | 36.400.000  | 8 Dokumen  | 71.400.000  | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 15 02 2.14    | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan</b>                                              | - | 100 %      | 91.000.000  | 100 %      | 94.640.000  | 100 %      | 185.640.000 | DISHUB |             |
| 2 15 02 2.14 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | - | 12 Laporan | 45.500.000  | 12 Laporan | 47.320.000  | 24 Laporan | 92.820.000  | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 15 02 2.14 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | - | 12 Laporan | 45.500.000  | 12 Laporan | 47.320.000  | 24 Laporan | 92.820.000  | DISHUB | Kab. Ciamis |

|   |    |    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |   |           |                |           |                |           |                |        |             |
|---|----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 2 | 15 | 02 | 2.16    | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 100%      | 126.000.000    | 100%      | 131.040.000    | 100%      | 257.040.000    |        |             |
| 2 | 15 | 02 | 2.16 01 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  | - | 1 Dokumen | 45.500.000     | 1 Dokumen | 47.320.000     | 2 Dokumen | 92.820.000     | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 | 15 | 02 | 2.16 02 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | - | 1 dokumen | 45.500.000     | 1 dokumen | 47.320.000     | 1 dokumen | 92.820.000     | DISHUB | Kab. Ciamis |
| 2 | 15 | 02 | 2.16 03 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota               | - | 3 Laporan | 35.000.000     | 3 Laporan | 36.400.000     | 6 Laporan | 71.400.000     | DISHUB | Kab. Ciamis |
|   |    |    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |   |           | 31.252.020.000 |           | 32.431.380.000 |           | 63.683.400.000 |        |             |

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun 2025-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPD , sesuai pada table 7.1

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026

| No | Indikator                                          | Kondisi Kinerja pada awal periode | Target Capaian setiap Tahun |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|
|    |                                                    | 2024                              | 2025                        | 2026   |                                    |
| 1  | 2                                                  | 3                                 | 4                           | 5      | 6                                  |
| 1  | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan             | 3                                 | 3                           | 3      | 3                                  |
| 2  | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan                   | BB                                | BB                          | A      | A                                  |
| 3  | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan        | 813,43                            | 813,5                       | 813,75 | 813,75                             |
| 4  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan | 87,994                            | 87,995                      | 87,996 | 87,996                             |
| 5  | Indeks keselamatan lalu lintas                     | 96,902                            | 97,400                      | 97,415 | 97,415                             |

Dari tabel tersebut disimpulkan dari ke 5 (lima) Indikator tersebut bahwa Dinas Perhubungan mentargetkan kenaikan pada setiap-tahunnya

## 7.1 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama yang disusun oleh Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

Tabel 7. 2  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis  
Tahun 2025-2026

| No | Tujuan                                                                                                            | Indikator Tujuan                 | Sasaran                                                                                                 | Indikator Sasaran                                         | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                  |                                                                                                         |                                                           | 2025                                  | 2026   |                                            |
| 1  | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata                                                     | Indeks keselamatan lalu lintas   |                                                                                                         |                                                           | 97,400                                | 97,415 | 97,415                                     |
|    |                                                                                                                   |                                  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | 94,801                                | 94,830 | 94,830                                     |
|    |                                                                                                                   |                                  |                                                                                                         | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | 100                                   | 100    | 100                                        |
| 2  | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan        | 87,995                                | 87,996 | 87,996                                     |

|  |  |                                      |                                                                                                                                                                                |                                             |       |        |        |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
|  |  | Hasil Evaluasi AKIP                  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan            | BB    | A      | A      |
|  |  | Maturitas SPIP                       | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan      | 3     | 3      | 3      |
|  |  | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah                                                                                                                    | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan | 813,5 | 813,75 | 813,75 |

Dari Tabel 7.2 bahwa Terdapat dua Tujuan yang pertama Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata dengan indikator tujuan Indeks keselamatan lalu lintas dengan Program Penunjang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dimana seluruh bidang perhubungan mengacu pada Tujuan Tersebut. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan 4 (empat) Indikator Tujuan, yang masing- masing memiliki output yang berbeda dengan program Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Tujuan Kedua Presentase di tahun 2025 dan 2026 untuk mengalami peningkatan dengan cara melaksanakan Seluruh kegiatan tersebut dengan optimal dan juga efisien, sehingga dapat tercapai target akhir dari periode renstra yang sudah di tentukan pada tabel tersebut.

## 7.2 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Tahun 2024-2026

Tabel 7. 3

Target Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2024-2026

| No | Indikator                    | Satuan | Perhitungan                                                                                                          | Kondisi Kinerja Pada Awal | Tahun |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir |
|----|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------------|
|    |                              |        |                                                                                                                      |                           | 2025  | 2026  |                            |
| 1  | Rasio konektivitas Kabupaten | %      | (Jumlah trayek perintis+Jumlah trayek AKAP)/Jumlah kebutuhan trayek perintis dan AKAP dalam kurun waktu tertentu*100 | 0,248                     | 0,248 | 0,248 | 0,248                      |
| 2  | V/C Ratio di Jalan Kabupaten | %      | Survey perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan                                                        | 0,30                      | 0,30  | 0,30  | 0,30                       |

Dinas perhubungan kabupaten ciamis terdapat 2 Indikator yaitu Rasio Konektivitas Kabupaten, dan Selanjutnya V/C Ratio di Jalan Kabupaten . Kedua indikator tersebut sama – sama memiliki target nilai yang konstan disetiap tahunnya. Dikarenakan , Faktor jalan yang tidak ada penambahan panjang maupun lebar terhadap median jalan di kabupaten ciamis, sehingga Peran dari dinas perhubungan untuk menekan volume Lalu Lintas dengan cara memberikan alternatif moda Transportasi Umum kepada masyarakat,. Dengan demikian dalam meberikan alternatif moda Transportasi saling berkolerasi dengan rasio konektivitas , dimana Terintegrasinya Angkutan umum di kabupaten ciamis merupakan solusi dari ke dua Indikator.

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Ciamis.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perhubungan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perhubungan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ini.

  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS  
**DANANG MURYATNA. S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19710301 199101 1 002